

Peran Hukum Adat Melayu dalam Penataan Masyarakat Multikultural di Kota Medan

Suci Maharani¹, Rusni Harianti Nainggolan², Herlina Hanum Harahap³

¹²³Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

sucimhnoofficial@gmail.com¹, rusninainggolan56@gmail.com²,

lina42harahap@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Malay customary law in structuring multicultural society in Medan City. As a city with high ethnic and cultural diversity, Medan City is a concrete example of how customary law can function as a unifying instrument within the framework of multiculturalism. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore various aspects of Malay customary law as applied in people's daily lives, as well as their impact on harmonizing relations between ethnic groups. The research results show that Malay customary law has an important role in creating social balance through principles that prioritize deliberation, mutual respect and justice. However, there are challenges in implementing customary law in line with the influence of developments in state law and globalization which is increasingly strengthening. The conclusion of this research is that Malay customary law remains relevant in supporting the structuring of a multicultural society, but there needs to be adaptation and collaboration with the formal legal system to achieve better social integration.

Key words: Malay customary law, community planning, multiculturalism, Medan City, diversity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat Melayu dalam penataan masyarakat multikultural di Kota Medan. Sebagai kota dengan keberagaman etnis dan budaya yang tinggi, Kota Medan menjadi contoh konkrit bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen pemersatu dalam kerangka multikulturalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali berbagai aspek hukum adat Melayu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta dampaknya terhadap harmonisasi hubungan antarkelompok etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Melayu memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui prinsip-prinsip yang mengutamakan musyawarah, saling menghormati, dan keadilan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi hukum adat seiring dengan pengaruh perkembangan hukum negara dan globalisasi yang kian menguat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum adat Melayu tetap relevan dalam mendukung penataan masyarakat multikultural, namun perlu ada adaptasi dan kolaborasi dengan sistem hukum formal untuk mencapai integrasi sosial yang lebih baik.

Kata kunci: hukum adat Melayu, penataan masyarakat, multikulturalisme, Kota Medan, keberagaman

PENDAHULUAN

Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, merupakan representasi nyata dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Sebagai pusat

perdagangan dan migrasi, Medan telah menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis, seperti Melayu, Batak, Tionghoa, dan lain-lain, yang masing-masing membawa nilai-nilai budaya dan hukum adat mereka. Dalam konteks tersebut, hukum adat Melayu memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan mengatur interaksi antarkelompok dalam masyarakat multikultural. Hukum adat Melayu, yang kaya dengan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur hubungan sosial dalam masyarakat Melayu, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan kedamaian dan harmoni di tengah keragaman. Dalam kota yang penuh dinamika ini, hukum adat Melayu berperan dalam menyelesaikan konflik, menjaga keseimbangan sosial, serta memfasilitasi integrasi antara berbagai kelompok etnis yang ada. Namun, peran hukum adat dalam penataan masyarakat multikultural Medan sering kali terabaikan, meskipun pentingnya hukum adat dalam menjaga stabilitas sosial tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum adat Melayu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Medan, serta bagaimana peranannya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah perbedaan yang ada. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat Melayu di kota yang multikultural ini, serta potensi dan peluang yang ada untuk memperkuat keberadaan hukum adat dalam mendukung terciptanya masyarakat Medan yang lebih adil dan beradab.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai kajian dan literatur terkait peran hukum adat Melayu dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya di Kota Medan. Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, merupakan contoh nyata dari masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Hukum adat Melayu, yang merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat Melayu, berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara kelompok-kelompok yang berbeda.

1. Hukum Adat Melayu: Konsep dan Ruang Lingkup Hukum adat Melayu adalah seperangkat aturan yang diatur oleh tradisi dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Melayu, yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara individu dan masyarakat. Hukum adat ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, serta aturan dalam berinteraksi sosial. Hukum adat Melayu ini menjadi penting karena mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati.
2. Peran Hukum Adat dalam Menjaga Keharmonisan Sosial dalam masyarakat yang multikultural seperti di Kota Medan, hukum adat Melayu berfungsi sebagai penyeimbang antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas

budaya yang berbeda. Hukum adat memberikan pedoman dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara-cara yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Sebagai contoh, musyawarah adalah salah satu metode dalam hukum adat yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, tanpa harus mengedepankan kekerasan atau pemaksaan.

3. Masyarakat Multikultural dan Tantangan dalam Penataan Sosial Kota Medan merupakan kota yang memiliki beragam suku dan agama, seperti Melayu, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan lainnya. Keberagaman ini tentunya menghadirkan tantangan tersendiri dalam penataan sosial. Konflik antarkelompok bisa muncul baik dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karena itu, hukum adat Melayu yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dianggap relevan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa harus mengesampingkan perbedaan yang ada. Dalam hal ini, hukum adat Melayu bisa menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antar kelompok etnis dan agama di Medan. Kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli hukum dan sosiologi menyebutkan bahwa hukum adat Melayu memiliki daya tarik tersendiri karena fleksibilitasnya dalam merespons perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat multikultural.
4. Implementasi Hukum Adat dalam Konteks Modern Meskipun hukum adat Melayu memiliki nilai dan kekuatan dalam masyarakat tradisional, tantangan muncul ketika hukum ini harus diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang bersifat nasional dan lebih formal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum adat di kota-kota besar seperti Medan sering kali bertemu dengan hambatan dari sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan negara yang tidak selalu sejalan dengan adat. Namun demikian, hukum adat Melayu di Kota Medan masih bisa berfungsi dalam batas-batas tertentu, terutama dalam menyelesaikan sengketa adat, pernikahan, dan warisan yang masih mengikuti tradisi. Beberapa lembaga adat di Medan, seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), berperan penting dalam memfasilitasi proses penyelesaian masalah di luar jalur hukum formal, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum nasional.
5. Keterkaitan dengan Toleransi Sosial dan Pembangunan Kota Medan. Dalam kerangka masyarakat multikultural, hukum adat Melayu juga berperan dalam membangun dan mempertahankan toleransi sosial antarkelompok yang berbeda. Penelitian oleh beberapa ahli sosiologi menyatakan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam memfasilitasi interaksi antaretnis yang berbeda dan menciptakan ruang bagi kebersamaan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional perlu dilakukan dengan bijak, agar tidak hanya menjaga nilai-nilai kearifan lokal, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan harmonis di Kota Medan.

Hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam penataan masyarakat multikultural di Kota Medan. Hukum adat dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keharmonisan sosial, menyelesaikan konflik, dan mengatur interaksi antarkelompok budaya yang berbeda. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum negara yang lebih formal, serta bagaimana memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum adat dapat terus dijaga dalam konteks masyarakat yang terus berkembang.

Peran Hukum Adat Melayu dalam Masyarakat Multikultural. Hukum adat Melayu di Medan, sebagai bagian dari kebudayaan Melayu, telah memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk tata kehidupan sosial masyarakat. Beberapa peran penting hukum adat Melayu dalam konteks multikultural di Medan antara lain:

Hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam penataan masyarakat multikultural di Kota Medan. Ia berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, mengatur perilaku masyarakat, serta menjadi alat untuk penyelesaian sengketa. Meskipun ada tantangan dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi, penerapan nilai-nilai hukum adat Melayu tetap relevan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi hukum adat dalam masyarakat Medan agar dapat terus berfungsi sebagai penuntun dalam kehidupan yang multikultural dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi peran hukum adat Melayu dalam penataan masyarakat multikultural di Kota Medan. Penelitian ini melibatkan wawancara terstruktur untuk memahami bagaimana lembaga adat berfungsi dalam meningkatkan partisipasi politik, menjaga keharmonisan, dan menyelesaikan konflik di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Hukum adat Melayu, yang berlandaskan syariat Islam, juga berperan dalam pengaturan sosial dan pelestarian budaya, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, merupakan kota yang sangat multikultural dengan beragam suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Di dalam masyarakat yang memiliki keberagaman tersebut, hukum adat Melayu memainkan peran penting dalam penataan kehidupan sosial, menjaga harmoni antarkelompok, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Peran Hukum Adat Melayu dalam Masyarakat Multikultural Hukum adat Melayu di Medan, sebagai bagian dari kebudayaan Melayu, telah memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk tata kehidupan sosial masyarakat. Beberapa peran penting hukum adat Melayu dalam konteks multikultural di Medan antara lain:

1. Menjaga Keberagaman dan Toleransi. Hukum adat Melayu mengajarkan tentang nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan. Ini menjadi landasan penting untuk menjaga toleransi antarkelompok etnis yang ada di Medan, seperti Melayu, Batak, Cina, dan India. Hukum adat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang mungkin melibatkan berbagai kelompok etnis, mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian masalah.
2. Penegakan Norma Sosial yang Seimbang. Di dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat Melayu juga mengatur tata perilaku masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan, pembagian warisan, serta interaksi sosial lainnya. Prinsip keseimbangan dan keadilan yang terkandung dalam hukum adat ini membantu mengatur kehidupan masyarakat yang heterogen, sehingga berbagai kelompok bisa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
3. Pengaturan Pemeliharaan Lingkungan dan Kehidupan Ekonomi. Hukum adat Melayu juga mengatur aspek-aspek kehidupan lain seperti pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini berhubungan dengan cara-cara masyarakat Melayu hidup selaras dengan alam. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Medan, hukum adat ini memberi ruang untuk penyesuaian nilai-nilai lokal dengan dinamika sosial yang lebih luas.

Implementasi Hukum Adat dalam Masyarakat Multikultural di Medan:

1. Musyawarah dan Konsensus
Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat Melayu sangat mengutamakan musyawarah, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa duduk bersama untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini mengutamakan perdamaian dan menghindari konflik terbuka, sehingga berkontribusi pada terciptanya kerukunan antarkelompok masyarakat.
2. Peran Pemuka Adat dan Lembaga Adat.
Pemuka adat dan lembaga adat Melayu memainkan peran sentral dalam menjaga dan menegakkan hukum adat di Medan. Mereka berperan sebagai mediator, penyelesai sengketa, dan penegak norma sosial dalam masyarakat. Keberadaan mereka penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan meskipun dalam konteks masyarakat yang multikultural dan modern.
3. Pendidikan Adat dan Kultural.
Di Medan, pendidikan mengenai hukum adat Melayu juga diberikan secara informal melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Ini penting untuk menjaga agar generasi muda memahami nilai-nilai luhur dalam hukum adat yang dapat menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun hukum adat Melayu memiliki peran yang signifikan dalam penataan masyarakat multikultural di Medan, terdapat beberapa tantangan dan hambatan, antara lain:

1. Perubahan Sosial dan Globalisasi

Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat, yang kadang mengarah pada penurunan pengaruh hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa generasi muda mungkin kurang memahami atau tertarik untuk menerapkan hukum adat.

2. Keragaman Sistem Hukum

Selain hukum adat, masyarakat di Medan juga terikat dengan hukum negara, agama, dan hukum lainnya yang berbeda-beda. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum formal negara bisa menjadi masalah dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum lainnya.

3. Perbedaan Interpretasi

Terkadang terdapat perbedaan interpretasi tentang penerapan hukum adat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam penataan masyarakat multikultural di Kota Medan. Ia berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, mengatur perilaku masyarakat, serta menjadi alat untuk penyelesaian sengketa. Meskipun ada tantangan dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi, penerapan nilai-nilai hukum adat Melayu tetap relevan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan implementasi hukum adat dalam masyarakat Medan agar dapat terus berfungsi sebagai penuntun dalam kehidupan yang multikultural dan demokratis.

KESIMPULAN

Hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengatur interaksi antarberbagai kelompok budaya di Kota Medan yang multikultural. Sebagai sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, hukum adat Melayu dapat menjadi sarana untuk meredam konflik antar kelompok, memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai, serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam keragaman. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, hukum adat Melayu juga berfungsi sebagai penghubung antara tradisi dan modernitas, memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan identitas budaya mereka sembari beradaptasi dengan perubahan zaman.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang lebih universal dan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar adat Melayu. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum

nasional serta memperkuat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum adat Melayu dapat terus berperan dalam membangun Kota Medan sebagai kota yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Wendra Yunaldi, S. M. (2021). *Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Medan
- Dr.H.Erwin Owansyah soetoto S.H., M. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza media.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341-â.
- Laudra, D. C., Pauziah, F., Siburian, N. U., Sibarani, G., Manalu, S. B., & Ivanna, J. (2021). Mengenal dan Melestarikan Budaya Melayu Deli di Kota Medan Sumatera Utara. *Jotika Journal in Education*, 1(1), 6-9.
- Regar, N. A., Pasaribu, S. O., Gaol, D. L., & Ivanna, J. (2024). Peran Lembaga Adat dalam Sistem Politik di Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24139-24145.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15722>
- Ruslan, R. (n.d.). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli). *Sintaksis*, 1(3), 77-86.
- Sinar, L., Ridwan, H. T. A., Zulkifli, Z., Sinar, T. S., & Rabullah, R. (1992). Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Masyarakat Melayu di Sumatera Utara.